

ABSTRAK

ANGKATAN DARAT DALAM POLITIK PADA MASA UNDANG-UNDANG DARURAT BAHAYA PERANG ATAU S.O.B (*STAAL VAN OORLOG EN VAN BELEG*) DI INDONESIA TAHUN 1957-1963

Oleh:

Ilham Galih Pambudi

NIM. 12406241008

Angkatan Darat (AD) merupakan salah satu matra TNI yang aktif dalam pemerintahan sipil. Perbedaan pandangan antara pimpinan Angkatan Darat dengan pemerintah sipil mengenai siapa yang berhak memerintah menjadi penyebab masalah yang cukup panjang antara golongan sipil dengan Angkatan Darat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui (1) latar belakang Angkatan Darat masuk dunia politik, (2) peran Angkatan Darat dalam politik semasa diterapkannya Undang-undang Darurat Bahaya Perang / S.O.B tahun 1957-1963, (3) pengaruh diberlakukannya S.O.B terhadap Angkatan Darat.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Tahap penelitian diawali dengan pemilihan topik yang merupakan kegiatan awal untuk menentukan permasalahan yang akan dikaji. Tahap kedua adalah pengumpulan sumber baik dari arsip, koran, maupun buku-buku. Sumber-sumber tersebut didapat dari berbagai tempat diantaranya Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan UNY, Jogja Library Center, dan Perpustakaan Nasional. Tahap ketiga adalah verifikasi yang disebut juga kritik sumber untuk memastikan bahwa sumber tersebut sudah valid. Tahap keempat adalah interpretasi yang merupakan tahap penafsiran. Tahap kelima adalah penulisan sejarah sebagai hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Angkatan Darat (AD) memiliki faktor pendorong yang kuat untuk masuk dunia politik sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Beberapa peristiwa sebagai pendorong AD masuk politik muncul seperti Peristiwa 3 Juli 1946, Peristiwa 17 Oktober 1952, dan berbagai pergolakan daerah luar Jawa. (2) Setelah S.O.B diberlakukan pada tanggal 14 Maret 1957, AD dibawah KSAD A.H. Nasution bersikap sangat politis. Berbagai badan dibentuk untuk memperkuat kedudukan AD di dalam pemerintahan seperti BKSM, FNPIB, Dewan Nasional dan sebagainya, serta dibentuknya *civic mission* maupun diperkuatnya golongan fungsional militer sebagai pengaruh dicabutnya S.O.B tahun 1963 terhadap AD. (3) Puncak perseteruan politik antara AD dengan kaum politisi mulai memanas saat memasuki tahun 1961 hingga 1965, ketika terjadi pertarungan politik antara AD melawan Sukarno yang berkolaborasi dengan PKI dengan puncaknya peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Pasca peristiwa tersebut, AD tetap eksis di politik bahkan lebih kuat dengan keluarnya supersemar tahun 1966.

Kata Kunci: *Angkatan Darat, Politik, S.O.B, Indonesia, 1957-1963*

THE ARMY IN POLITICS DURING THE MARTIAL LAW OR S.O.B (STAAL VAN OORLOG EN VAN BELEG) IN INDONESIA IN 1957-1963

The army is one of dimensions of TNI which is active in civil administration. The differences between the army leader and civilian government about who is entitled to direct is the cause of long enough problem between civil group and the army. The purpose of this written essay are to know about : 1). The background of army in politics 2). The roles of army and politics during the implementation of martial law/SOB in 1957-1963 3). The effects of enactment of SOB to the army.

This research essay use critical history methods. The research phases are begun with topic election which is an initial activity to determine problem that will be examined. Second phase is collect the sources from files, newspapers, nor books. The sources are obtainable from various places such as National Files of Indonesia Republic, UNY Library, Jogja Library Center, and National Library. Third phase is verification which is called as sources critical to make sure that the sources are valid. The fourth phase is interpretation which means to interpret. The fifth phase is historiography as research result.

This research shows that, (1) the Army (AD) has a strong supporting factors to enter politics since Proclamation in 17 August 1945. Some events as the supporter of AD in politics are appear, such as the event of 3 July 1946, the event of 17 October 1952, and some of region upheavals outside Java. After S.O.B is used in 14 March 1957, AD under KSAD A.H., Nasution is very politicized. (2) Many agencies are formed to make the position of AD stronger in government such as BKSM, FNPIB, National council, etc. and formed a *civic mission* nor make the group of functional military stronger as the effect of S.O.B repealed in 1963 to AD. (3) The political peak feud between AD and politicians starts to heat up in 1961 to 1965, when the politics fight between AD against Soekarno which is collaborate with PKI in the peak event in G30S/PKI happened in 1965. Post of the event, AD still exist in politics even getting stronger with the release of Supersemar in 1966.

Keywords: *The Army, Politics, S.O.B, Indonesia, 1957-1963*

A. Pendahuluan

Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan tersebut diperoleh dari hasil perjuangan sendiri¹, dalam memperoleh kemerdekaannya bangsa Indonesia berjuang melalui 2 jalan yaitu mengangkat senjata dan diplomasi. Perjuangan dengan mengangkat senjata ini militer memiliki fungsi yang sangat besar, terutama pasca proklamasi baik ketika menghadapi Sekutu seperti Peristiwa 10 November, Peristiwa Bandung Lautan Api, Peristiwa Palagan

¹Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus, dan dengan demikian menghadapkan para pemimpin Indonesia pada suatu masalah yang berat. Karena pihak Sekutu tidak menaklukkan kembali Indonesia, maka kini terjadi suatu kekosongan politik. Pihak Jepang masih tetap berkuasa namun telah menyerah, dan tidak tampak kehadiran pasukan Sekutu yang akan menggantikan mereka. Lihat, M.C.Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007, hlm.426.

Ambarawa, dan lain sebagainya serta agresi militer Belanda (Agresi militer Belanda I dan II) yang ingin kembali merebut Indonesia maupun menghadapi ancaman disintegrasi² bangsa.

Keadaan awal kemerdekaan yang penuh dengan ancaman fisik dari luar tersebut mengakibatkan golongan militer dari bekas PETA, KNIL, Heiho, dan lain sebagainya harus menjadi ujung tombak pertahanan, sehingga mereka (militer) menghendaki agar segera dibentuk tentara nasional. Permasalahan muncul ketika golongan sipil (pemerintah) tidak memenuhi permintaan golongan militer tersebut. Pemerintah hanya membentuk badan keamanan, yaitu Badan Keamanan Rakyat (BKR).³

Perselisihan masalah pembentukan angkatan perang negara antara pemerintah dengan golongan militer ini menimbulkan gejolak yang panjang, terlebih ketika strategi pemerintah yang dijalankan dalam menghadapi serangan Belanda dianggap golongan militer merugikan negara, seperti hasil perjanjian Renville. Pertentangan ini mendorong militer (Angkatan Darat) untuk masuk ke politik, sehingga muncul berbagai peristiwa seperti Peristiwa 3 Juli 1949, Peristiwa 17 Oktober⁴, Piagam Keutuhan Angkatan Darat⁵, pergolakan daerah luar Jawa yang menuntut keadilan dan pemerataan pembangunan dari pemerintah pusat di Jakarta (Jawa).

Pergolakan daerah yang terus menjadi-jadi antara tahun 1956-1957 membuat pemerintah jatuh bangun dengan cabinet yang sering berganti. Terlebih saat Presiden mencanangkan sistem Demokrasi Terpimpin.⁶ pada akhir tahun 1956 dan sekaligus

² Keadaan tidak bersatu. Lihat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.143.

³ BKR bukanlah tentara reguler, melainkan suatu Korps Pejuang Bersenjata. Lihat, Soebijono, dkk, *Dwi Fungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997), hlm.10.

⁴ Peristiwa 17 Oktober menurut Salim Said merupakan konflik terbuka pertama antara militer dengan pemerintah sipil pasca kemerdekaan. Lihat, Salim Said dalam Asvi Warman Adam, *Seabad Kontroversi Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm.55.

⁵ Dikeluarkan Piagam Keutuhan Angkatan Darat karena pimpinan TNI AD terpecah akibat dari peristiwa 17 Oktober 1952 dan pemerintah sepertinya tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam tubuh TNI AD. Lihat, Yahya A.Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm.82.

⁶ Suatu sistem yang diambil dari gagasan pribadi Presiden Sukarno dan dijalankan bersama-sama dengan pimpinan TNI (Angkatan Darat khususnya) Lihat, Yuli Hananto, *Bermuka Dua Kebijakan Soeharto Terhadap Soekarno Beserta Keluarganya*. (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm.51.

mundurnya Bung Hatta dari kursi Wakil Presiden karena perbedaan politik dengan Presiden Sukarno. Tuntutan dari luar Jawa kepada pemerintah pusat di Jawa agar dikembalikannya Dwitunggal Sukarno-Hatta dengan tindakan penyelundupan barang-barang secara ilegal serta pernyataan pemutusan hubungan dengan pemerintah pusat dari komandan-komandan daerah luar Jawa, membuat pemerintah membuat pemerintah pusat memberlakukan S.O.B atau undang-undang darurat bahaya perang pada tanggal 14 Maret 1957.

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang pada penelitian ini didasari oleh tiga rumusan masalah yang disusun peneliti. Rumusan masalah pertama skripsi ini akan menjelaskan latar belakang Angkatan Darat (AD) masuk ke dunia politik. Buku yang digunakan antara lain buku Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 3 Diplomasi Sambil Bertempur, karya A.H. Nasution. Buku Peristiwa 17 Oktober 1952 Ketika Moncong Meriam Mengarah ke Istana Merdeka, karya A.H. Nasution, dan buku Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966, karya Yahya A. Muhaimin.

Rumusan masalah yang kedua dalam skripsi ini akan menjelaskan peranan Angkatan Darat selama diberlakukannya undang-undang darurat bahaya perang atau S.O.B tahun 1957-1963. Buku yang digunakan dalam bab ini adalah buku Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 4, karya A.H. Nasution. Buku Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966, karya Yahya A. Muhaimin, dan buku Soekarno-Tentara-PKI Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961-1965, karya Rosihan Anwar.

Rumusan masalah yang ketiga dalam skripsi ini akan membahas dampak diberlakukannya S.O.B terhadap Angkatan Darat. Buku yang digunakan dalam bab ini adalah buku Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 6 (Masa Gestapu dan Kebangkitan Orde Baru), karya A.H. Nasution. Buku Soekarno-Tentara-PKI Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961-1965, karya Rosihan Anwar.

C. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian menurut Kuntowijoyo yaitu sejarah kritis. Tahap penelitian diawali dengan pemilihan topik yang merupakan kegiatan awal untuk menentukan permasalahan yang akan dikaji. Tahap kedua adalah pengumpulan sumber baik dari arsip, koran, maupun buku-buku. Sumber-sumber

tersebut didapat dari berbagai tempat diantaranya Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan UNY, Jogja Library Center, dan Perpustakaan Nasional. Tahap ketiga adalah verifikasi yang disebut juga kritik sejarah untuk memastikan bahwa sumber tersebut sudah valid. Tahap keempat adalah interpretasi yang merupakan tahap penafsiran. Tahap kelima adalah penulisan sejarah sebagai hasil penelitian.

D. Pembahasan

1. Latar Belakang Angkatan Darat Masuk Ke Dunia Politik.

a. Peristiwa 3 Juli 1946.

Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan disaat terjadi kekosongan kekuasaan membuat Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II marah dan memerintahkan Belanda untuk menangkap Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yaitu Sukarno-Hatta. Kemarahan Sekutu tersebut menimbulkan peperangan antara Indonesia dengan Sekutu dan Belanda sehingga ibu kota RI di Jakarta pindah ke Jogjakarta dan muncul sebutan Republik Jogja.⁷

Keadaan yang mencekal dan membahayakan Sukarno-Hatta tersebut memunculkan perebutan kekuasaan jika Sukarno tertangkap atau meninggal. Perebutan kekuasaan itu terjadi antara Tan Malak dengan Syahrir. Adanya persaingan tersebut membuat Presiden Sukarno mengubah system pemerintahan yang awalnya presidentil atau presidensial,⁸ menjadi sistem pemerintahan parlementer⁹ dengan menunjuk Syahrir sebagai Perdana Menteri. Meskipun sesungguhnya Presiden

⁷ Republik Jogja adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut periode ketika kedudukan ibu kota Republik Indonesia berada di Yogyakarta, yaitu antara tanggal 4 Januari 1946 sampai tanggal 27 Desember 1949. Lebih lengkap lihat, A.Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Indonesia Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2011), hlm.51.

⁸ Sistem pemerintahan Presidensial adalah sistem pemerintahan yang badan legislatif dan badan eksekutifnya boleh dikatakan tidak terdapat hubungan seperti pada sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial pada umumnya memiliki ciri sebagai berikut: (i) kekuasaan pemerintahan terpusat pada satu orang, yaitu presiden, sehingga presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, (ii) presiden dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat dan bertanggung jawab kepadanya, (iii) masa jabatan presiden ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Lihat, Sunarso dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan PKN untuk Perguruan Tinggi*. (Yogyakarta: UNY Press, 2006), hlm.143.

⁹ Sistem pemerintahan Parlementer adalah sistem pemerintahan yang badan eksekutif dan badan legislatif (pemerintah dan parlemen/DPR) memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Lihat, *Ibid*, hlm.143.

Sukarno juga bersimpati kepada Tan Malaka.¹⁰ Ditunjuknya Syahrir sebagai Perdana Menteri ini dikarenakan strategi politik Syahrir sama dengan Presiden Sukarno yaitu diplomasi, sedangkan strategi Tan Malaka sangat berbeda dengan Presiden Sukarno yaitu lebih mengutamakan perjuangan fisik dengan jalan peperangan. Strategi politik Tan Malak ini diam-diam mendapat simpati dari militer pimpinan Jenderal Sudirman, hal inilah yang mengindikasikan bahwa militer (Angkatan Darat terutama) mulai masuk politik.

Ditunjuknya Syahrir sebagai Perdana Menteri yang mengutamakan diplomasi dalam menghadapi Belanda, membuat Tan Malaka tidak senang. Tan Malaka dengan kelompoknya yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan akhirnya berhasil menjatuhkan Syahrir. Tan Malaka kemudian ditunjuk Presiden untuk membentuk cabinet, namun tidak mampu. Syahrir akhirnya ditunjuk Presiden kembali untuk membentuk cabinet dan berhasil menjadi Perdana Menteri yang kedua kalinya.¹¹ Terpilihnya Syahrir sebagai Perdana Menteri yang kedua ini membuat Tan Malaka bersama PP-nya semakin tidak suka sehingga pada tanggal 17 Maret 1946 PP melakukan *rally* besar-besaran di Madiun, namun dapat ditumpas oleh pemerintah.

Tindakan Tan Malaka di Madiun yang berhasil ditumpas tersebut tidak berakhir begitu saja. Pada tanggal 3 Juli 1946 datang utusan kepada Presiden untuk mengajukan petisi yang intinya agar Presiden menyetujui pembentukan Dewan Politik Tertinggi dengan Tan Malaka ketuanya dan menyerahkan seluruh kekuatan Angkatan Peran dibawah Jenderal Sudirman. Petisi tersebut ditolak dan semua yang terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946 serta pimpinan PP termasuk Tan Malaka ditangkap pemerintah. Sejak saat itu Tan Malaka dan PP-nya menjadi lumpuh dan peristiwa 3 Juli 1946 gagal.

¹⁰ Asvi Warman Adam, *Mengungkap Misteri Sejarah*. (Jakarta: Kompas, 2010), hlm.78.

¹¹ Rushdy Hoesein, *Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati*. (Jakarta: Kompas, 2010), hlm.62.

b. Peristiwa 17 Oktober 1952.

Pada masa Demokrasi Parlementer lebih tepatnya masa Kabinet Wilopo¹² diberlakukan kebijakan penghematan anggaran belanja oleh pemerintah. Penghematan tersebut juga termasuk pada anggaran belanja TNI, sehingga di dalam TNI harus dilakukan demobilisasi dan rasionalisasi yang membuat prajurit TNI harus dikurangi jumlahnya dan ditingkatkan kemampuannya. Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam TNI sendiri.

Bulan Juli 1952 muncul permintaan dari Kolonel Bambang Supeno agar KSAD yang saat itu dijabat Kolonel A.H. Nasution diganti. Permintaan Kolonel Bambang Supeno tersebut ditolak,. Hal tersebut membuat Kolonel Bambang Supeno mengirimkan surat kepada menteri pertahanan dan parlemen omisi pertahananyang isinya dia sudah tidak menaruh kepercayaan lagi kepada atasannya. Akibat dari perbuatan itu maka Kolonel Bambang Supeno diberhentikan dari tugasnya oleh KSAD. Setelah itu KSAD beserta menteri pertahanan dan KSAP menghadap Presiden untuk membahas masalah tersebut, namun Presiden tidak menyetujui dan tidak mau menandatangani keputusan pemberhentian Kolonel Bambang Supeno.¹³

Surat dari Kolonel Bambang Supeno tersebut menjadi bahasan di parlemen, sehingga parlemen melakukan beberapa sidang untuk membahasnya. Dari berbagai rapat di parlemen muncul beberapa mosi yang ditujukan kepada TNI dan kementerian pertahanan. Salah satu mosi yang diterima adalah mosi Manai Sophian yang isinya agar diadakan reorganisasi struktur pimpinan kementerian pertahanan dan kemiliteran. Melihat kaum politisi yang sudah mencampuri urusan intern TNI dengan diterimanya mosi Manai Sopian¹⁴ bahkan hingga masalah penggantian pimpinan TNI, maka TNI (Khususnya TNI AD) dibawah pimpinan KSAD Kolonel A.H.

¹² Kabinet ini berlangsung sejak bulan April 1952-Juni 1953, yang dipimpin oleh Mr. Wilopo. Lihat, Aman, *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan*. (Yogyakarta: Pujangga Press, 2013), hlm.63.

¹³ A.H. Nasution, *Peristiwa 17 Oktober 1952 Ketika "Moncong" Meriam Mengarah ke Istana Merdeka*. (Yogyakarta: Narasi, 2012), hlm.24.

¹⁴ Usul mosi Manai Sophian CS dalam sidang perlemen pleno terbuka kemarin diterima dengan suara 91 lawan 54. Sesudah parlemen menolak mosi usul mosi Baharudin dengan suara 39 lawan 50 suara. Lihat, Koran Kedaulatan Rakyat, *Suasana Ibukota Kini Sangat "Ernstig"*. Tanggal 17 Oktober 1952.

Nasution melakukan demonstrasi besar-besaran yang mengejutkan Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1952.

Demonstrasi yang mengerahkan lebih dari 30.000 demonstran dengan artileri militer yang diarahkan ke Istana Merdeka itu meminta kepada Presiden agar DPRS saat itu dibubarkan dan segera diadakannya pemilihan umum. Akan tetapi Presiden tidak dapat memenuhi semua permintaan demonstran. Presiden tidak bias membubarkan DPRS karena hal itu akan membuatnya menjadi dictator. Presiden berjanji akan segera mengadakan pemilihan umum dan meminta demonstran segera bubar dengan tenang. Usai membubarkan demonstran Presiden menghadap KSAD dan beberapa pimpinan TNI yang menjadi penggerak demonstrasi tersebut.

KSAD Kolonel A.H. Nasution beserta pimpinan TNI menyatakn kepada Presiden bahwa DPRS yang saat ini sudah tidak representative dan meminta agar dibubarkan. Namun Presiden tetap tidak bisa membubarkannya. Kolonel A.H. Nasution pasca kejadian itu mengundurkan diri dari jabatan KSAD sebagai bentuk pertanggungjawabannya.¹⁵ Sejak saat itu peristiwa 17 Oktober 1952 dapat dikatakan tidak berhasil, dan gagallah maneuver politik pertama kali yang dilancarkan TNI AD terhadap pemerintah.

c. Piagam Keutuhan Angkatan Darat 1958 dan Pergolakan Daerah Luar Jawa Tahun 1956.

Pasca peristiwa 17 Oktober 1952 pimpinan TNI AD pecah menjadi dua yaitu yang pro peristiwa 17 Oktober dan yang kontra peristiwa 17 Oktober. KSAD Kolonel A.H. Nasution yang mengundurkan diri kemudian digantikan oleh Kolonel Bambang Sugeng.¹⁶ Pengangkatan Kolonel Bambang Sugeng sebagai KSAD membuat suatu permasalahan antara Kolonel Bambang Sugeng dengan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sebab antara KSAD yang baru tersebut dengan Menteri Pertahanan terdapat perbedaan yang besar dalam menyelesaikan masalah intern TNI AD.

¹⁵ *Arsip Nasional Republik Indonesia*. Surat edaran dari SUAD perihal sekitar peristiwa 17 Oktober 1952 yang ditulis pada tanggal 24 November 1952 dan tertanda tangan atas nama KSAD Kolonel A.H. Nasution.

¹⁶ Pengangkatan Kolonel Bambang Sugeng ini tidaklah berjalan mulus, Kolonel Bambang Sugeng pernah menolak jabatan KSAD tersebut karena wakil KSAD Letkol. Sutoko dipindahkan oleh pemerintah dari Jakarta ke daerah. Lihat, Koran Kedaulatan Rakyat, *Kol. Bambang Sugeng tolak djabatn KSAD*. Tanggal 11 Desember 1952.

Sejak Kolonel Bambang Sugeng menjabat KSAD akhir tahun 1952 masalah intern TNI AD akibat peristiwa 17 Oktober tidak pernah selesai. Pada tanggal 17 Februari 1955 diadakan pertemuan para perwira TNI AD baik yang pro maupun kontra dengan peristiwa 17 Oktober, di Yogyakarta.¹⁷ Dalam pertemuan di Yogyakarta tersebut dibahas mengenai usaha mempersatukan kembali keretakan di dalam tubuh TNI AD selama ini. Pertemuan tersebut berlangsung hingga tanggal 25 Februari 1955 dan menghasilkan Piagam Keutuhan Angkatan Darat atau Piagam Yogya yang berisi tidak diperkenankan golongan sipil ikut campur urusan intern TNI AD terlebih lagi soal pengangkatan dan pergantian pimpinan, persatuan dikalangan perwira TNI AD yang selama ini pecah, serta berjanji dan mengucapkan sumpah setia akan tetap bersatu di makam almarhum Jenderal Sudirman dan almarhum Letjen. Urip Sumoharjo.¹⁸

Pasca ditandatangani Piagam Yogya keadaan politik dan ekonomi dalam negeri semakin kacau. Pemilihan umum di tahun 1955 tidak meredakan konflik politik.¹⁹ Pemerintah sipil tetap ikut campur pengangkatan pimpinan TNI AD ketika KSAD Kolonel Bambang Sugeng mengundurkan diri. Pergolakan luar Jawa terus bergelora. Kabinet Ali Satroamijoyo II yang memerintah semakin dirugikan setelah terjadi banyak penyelundupan di luar Jawa yang dipimpin komandan militer setempat, dengan alasan hal itu untuk memenuhi kebutuhan daerah luar Jawa yang selama ini pemerintah tidak memberi dengan merata.

Pergolakan luar Jawa semakin menjadi pasca mundurnya Bung Hatta dari Wakil Presiden karena perbedaan politik dengan Bung Karno. Mereka yang di luar Jawa menuntut pemerintah agar mengembalikan dwitunggal Sukarno-Hatta, sedangkan pemerintah sendiri juga mendapat tuntutan dari Presiden Sukarno yang menghendaki

¹⁷ Pertemuan perwira Angkatan Darat di Yogyakarta tersebut dimulai pukul 08.00 WIB tanggal 17 Februari 1955 bertempat di Gedung Negara (Gedung Agung). Lihat, Koran Kedaulatan Rakyat, *Rapat Perwira AD dibuka*. Tanggal 17 Februari 1955.

¹⁸ Di bawah hujan rintik-rintik para perwira yang sedang mengadakan pertemuan di Jogja, pergi kemarin pagi berziarah ke Makam Pahlawan Semaki, meletakkan karangan bunga diatas makam-makam Jenderal Sudirman dan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, berturut-turut oleh Ibu Sudirman dan Ibu Urip Sumoharjo serta oleh KSAD dan Jenderal Mayor Simatupang sebagai perwira senior yang tertua. Lihat Koran Kedaulatan Rakyat, *Djanji Para Perwira mengikuti djadjak pengorbanan Pahlawan*. Tanggal 26 Februari 1955.

¹⁹ Zulkarnain, *Jalan Meneguhkan Negara*. (Yogyakarta: Pujangga Press, 2011), hlm.107.

agar diterapkannya Demokrasi Terpimpin,²⁰ yang merupakan ide dan gagasannya. Akhirnya pemerintah yang sudah tidak bias bertahan karena mendapatkan desakan dari berbagai pihak menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 14 Maret 1957. Pada tanggal tersebut diberlakukan pula S.O.B atau undang-undang darurat bahaya perang di seluruh Indonesia. S.O.B ini yang menjadi landasan bagi TNI AD untuk melakukan hal-hal politik di luar kemampuan kemiliterannya.

2. Peran Angkatan Darat Dalam Politik Pada Masa Diberlakukannya Undang Undang Darurat Bahaya Perang / S.O.B Tahun 1957-1963.

a. Pembentukan Dewan Nasional dan Badan Kerjasama Sipil-Militer.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II mundur tanggal 14 Maret 1957. Presiden Sukarno kemudian menunjuk Suwiryo untuk membentuk kabinet namun gagal. Akhirnya Presiden membentuk kabinet sendiri, sebab Presiden sudah bosan dengan sistem kepartaian yang selama ini menguasai negara.²¹ Kabinet tersebut diberi nama kabinet Karya yang bersifat ekstraparlementer karena dibentuk oleh Presiden Sukarno sendiri.²² Presiden kemudian menunjuk Ir. Djuanda Karawijaya menjadi Perdana Menteri. Dalam pembentukan kabinet tersebut, Presiden Sukarno sengaja menaruh beberapa orang yang dekat dengannya untuk duduk di Kabinet.²³

Diberlakukannya S.O.B tersebut membuat TNI AD di bawah KSAD A.H. Nasution benar-benar bersikap politis. KSAD segera membentuk beberapa badan yang menguatkan TNI AD di arena politik. Badan Pertama adalah Badan Kerja Sama Militer (BKSM) yang terdiri dari bergagai macam seperti BKS Tani-Militer, BKS Buruh-Militer, BKS Pemuda-Militer, BKS Ulama-Militer, dan lain sebagainya. Pembentukan BKSM beraneka ragam tersebut didasarkan pada kekaryaan golongan dan ajaran pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Hankamrata). Akan tetapi

²⁰ Taufik Abdullah, dkk, *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm.48.

²¹ Beliau ingin mengakhiri sistem dimana hanya partai-partai yang memiliki negara, bahkan beliau pernah berkata, sebenarnya golongan karya dan fungsionallah yang lebih tepat sebagai pengatur negara. Lihat, A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 4 Masa Pancaroba II*. (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm.91.

²² Aman, *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan*. (Yogyakarta:Pujangga Press, 2013), hlm.67.

²³ Salah seorang kepercayaan Sukarno yang paling dekat, Chaerul Saleh (1916-67), masuk di dalam kabinet tersebut sebagai Menteri Urusan Veteran. Lihat, M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm.390.

pembentukan BKSM tersebut dirasa tidak begitu efektif.²⁴ Sebelum membentuk BKSM, TNI AD juga sudah membentuk Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang merupakan penyatuan dari beberapa organisasi veteran yang ada. LVRI direstui oleh Presiden, kemudian dikeluarkan surat keputusan Presiden RI No. 103/1957 tanggal 2 Januari untuk pengesahan LVRI.²⁵

Pada bulan Mei 1957 Kabinet Djuanda membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional adalah untuk menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat.²⁶ Dengan inilah Dewan Nasional yang merupakan refleksi dari masyarakat Indonesia kedudukannya dianggap lebih tinggi dari parlemen yang dianggap hanya refleksi dari partai-partai politik.

b. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)

Konsepsi Presiden Sukarno pada bulan Februari 1957 mengenai sistem Demokrasi Terpimpin menimbulkan gejolak politik yang lebih besar. Tuntutan pengembalian dwitunggal Sukarno-Hatta yang tidak terealisasikan, ditambah dengan gagal delegasi Indonesia di PBB pada bulan September 1957 dalam upaya merebut Irian Barat menambah kekecewaan luar Jawa terhadap Jawa (Pemerintah Pusat). Akibat beberapa peristiwa tersebut terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno dengan granat pada tanggal 30 November 1957, yang dikenal dengan peristiwa Cikini.²⁷

Bulan Desember 1957 beberapa tokoh Masyumi, PSI, serta militer antara lain Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan Sumitro Joyohadikusumo menyeberang ke Padang. Di Padang mereka membuat ultimatum untuk pemerintah pusat. Tanggal 10 Februari 1958 mereka mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat yang intinya adalah Kabinet Djuanda dibubarkan, Presiden Sukarno kembali kepada posisi konstitusionalnya yaitu sebagai kepala negara saja, dan menunjuk Moh.

²⁴ Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm.106.

²⁵ A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm.61.

²⁶ *Ibid*, hlm.93.

²⁷ Perihal peristiwa Cikini lebih lengkap lihat, A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm.171.

Hatta serta Sri Sultan Hamengkubowono IX untuk membentuk kabinet baru sampai terselenggaranya pemilihan umum.²⁸

Pasca diumumkan tuntutan Padang tersebut tidak bias dipenuhi oleh pemerintah. Akibatnya pada tanggal 15 Februari 1957 Padang mengumumkan dibentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) sebagai tandingan kepada pemerintah pusat dengan pusatnya di Bukittinggi.²⁹ Dua hari setelah pengumuman di Padang tanggal 15 Februari 1958 itu, Permesta di Sulawesi menyatakan bergabung dengan PRRI di Sumatera dan memutuskan segala ikatan dengan pemerintah pusat.

Pemerintah segera menjawab tantangan itu dengan pendekatan terlebih dahulu, agar terhindar dari peperangan sesama bangsa. Akan usaha tersebut gagal, maka pemerintah memutuskan untuk menjawab tantangan itu dengan operasi militer. Operasi militer yang digelar oleh pemerintah terdiri dari dua operasi militer. Operasi 17 Agustus untuk menumpas PRRI di Sumatera, dan operasi Merdeka untuk menumpas Permesta di Sulawesi. Pada pertengahan tahun 1958 pemerintah dapat menguasai Sumatera dan Sulawesi, sedangkan PRRI dan Permesta mundur ke hutan-hutan dengan perlawanan yang tidak berarti. PRRI dan Permesta resmi berakhir setelah pemerintah memanggil mereka untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi untuk membantu dalam perlawanan merebut Irian Barat melawan Belanda pada tahun 1961.

c. Pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat/ FNPIB.

Sebagai akibat dari gagalnya merebut Irian Barat melalui PBB, pada bulan Januari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). FNPIB ini diprakarsai oleh KSAD A.H. Nasution yang merupakan peledakan dari BKSM-BKSM dan diketuai oleh KSAD.³⁰ FNPIB ini ditujukan untuk memikul beban tanggungjawab perebutan Irian Barat, namun sesungguhnya tujuan FNPIB ini untuk mengurangi peranan Presiden serta partai politik, dan memperkuat posisi TNI AD. Akan tetapi

²⁸ Pengumuman tersebut disampaikan oleh komandan Kodim Sumatera Tengah Letkol. Ahmad Husein. Lihat, Audrey Kahin, *Dari Pemberintah Ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm.326-327. Mengenai tuntutan Ahmad Husein tersebut lebih lengkap dapat dilihat di *Arsip Nasional Republik Indonesia*. Keputusan Dewan Perjuangan Tentang Pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/PRRI.

²⁹ Perihal pembentukan PRRI di Bukittinggi dengan segala rincian susunan perdana menteri dan menteri-menterinya sebagai tandingan untuk pemerintah pusat dapat dilihat lebih lengkap di *Arsip Nasional Republik Indonesia*. Keputusan Dewan Perjuangan Tentang Pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/PRRI.

³⁰ A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm.166.

partai politik menentanginya dan menghambat perkembangannya sehingga FNPIB ini tidak begitu efektif.

FNPIB yang sudah berjalan dirasakan Presiden Sukarno terlalu menghambat langkah-langkahnya. Sebagai tandingan Presiden Sukarno membentuk Front Nasional pada tanggal 20 Januari 1961. Front Nasional terdiri dari banyak partai politik dan golongan fungsional yang saling berbeda pandangan dan ideology, sehingga Front Nasional ini juga tidak dapat dikendalikan Presiden Sukarno dengan baik, dan dirasa juga tidak efektif.

d. TNI AD dalam Demokrasi Terpimpin dan Dicabutnya S.O.B

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit di depan seluruh pimpinan negara dan TNI yang berisi tiga hal, pertama adalah dibubarkannya konstituante, kedua diberhentikannya UUDS 1950 dan diberlakukannya UUD 1945, ketiga segera dibentuk MPRS dan DPAS. Dekrit tersebut mendapat sambutan baik dari DPR hasil pemilu 1955.³¹ Sejak dekrit tersebut Indonesia resmi menggunakan sistem Demokrasi Terpimpin yang didukung TNI AD. Lima hari setelah Dekrit Presiden, Kabinet Karya dibubarkan dan pada tanggal Juli 1959 diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini Presiden Soekarno bertindak selaku perdana menteri.³²

Memasuki tahun 1960 pertikaian antara TNI AD dengan partai politik terutama PKI semakin memanas. PKI berhasil merangkul Presiden Sukarno yang juga merasa terancam kepentingan politiknya oleh TNI AD. Presiden terus berusaha melindungi PKI dengan doktrin Nasakom-nya.³³ Usaha lain yang dilakukan Presiden untuk melindungi PKI adalah mengganti KSAD A.H. Nasution dengan KSAD Ahmad Yani yang seorang Jawadan lebih mudah dipengaruhi Presiden, meskipun kenyataannya KSAD Ahmad Yani juga menentang PKI dengan kuat.

³¹ A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5 Kenangan Masa Orde Lama*. (Jakarta: Gunung Agung, 1989), hlm.4.

³² Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia VI*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm.419.

³³ Doktrin Nasakom ini sebenarnya usaha menghidupkan kembali pemikiran Sukarno yang pernah dikemukakan dahulu pada tahun 1926. Ia tetap yakin bahwa kepentingan golongan nasionalis, Islam, maupun Marxis dapat sama-sama cocok satu sama lain. Lihat, Yuli Hananto, *Bermuka Dua Kebijakan Soeharto Terhadap Soekarno Beserta Keluarganya*. (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm.60.

Sengketa Irian Barat yang sudah sejak lama dan tidak pernah ada penyelesaian, akhirnya membuat Presiden Sukarno menyatakan konfrontasi militer terhadap Belanda. Presiden Sukarno dalam pidatonya tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta memerintahkan dilaksanakannya Trikora (Tri Komando Rakyat).³⁴ Pada tanggal 2 Januari 1962 dibentuk Komando Mandala dibawah pimpinan Mayor Jenderal Suharto dengan pusatnya di Makassar, dan dibentuk Provinsi Irian Barat dengan ibi kota di Soasiu (Halmahera).³⁵ Konfrontasi militer tersebut menimbulkan korban dengan gugurnya putra-putri terbaik bangsa diantaranya adalah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno.

Dunia internasional mendukung Indonesia dalam sengketa tersebut, namun dalam perundingan Belanda tetap bersikap keras kepala ketika Diplomat Amerika yang bernama Ellswort Bunker memberikan usul penyelesaian yang isinya pertama Belanda harus menyerahkan Irian Barat kepada RI, kedua dalam beberapa tahun dalam pemerintah RI, rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menentukan pendapatnya tetap dalam RI atau memisahkan diri. Ketiga penyerahan Irian Barat dalam jangka waktu 2 tahun, dan ke empat agar tidak terjadi bentrokan fisik antara Indonesia Belanda, maka diadakan masa peralihan dibawah PBB selama 1 tahun.³⁶

Indonesia dapat menyetujui usul Ellswort Bunker tersebut namun Belanda tidak. Sikap Belanda keras kepala tersebut membuat Indonesia menyiapkan operasi militer besar yang disebut Operasi Jayawijaya. PBB yang tidak ingin terjadi pertempuran yang lebih besar lagi, memaksa Belanda agar menyetujui dengan jaminan ekonomi. Pada tanggal 15 Agustus 1962 Belanda mneyetujui dan ditandatangani perjanjian New York, yang salah satu isinya adalah Irian Barat akan diserahkan kepada Indonesia oleh PBB melalui UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*) pada tanggal 1 Mei 1963. Pada tanggal 1 Mei 1963 Indonesia resmi menerima Irian Barat dari PBB sebagai wilayah kedaulatan RI, dan pada tanggal

³⁴ Rosihan Anwar, *Sukarno, Tentara, PKI Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*. (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), hlm.83.

³⁵ Pembentukan Provinsi Irian Barat ini ditujukan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Irian Barat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Lihat, A. Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Indonesia Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2011), hlm.101.

³⁶ Aman, *op.cit.*, hlm.99.

penyerahan Irian Barat kepada Indonesia itu juga S.O.B resmi dicabut oleh pemerintah.

3. Dampak Diberlakukannya S.O.B Terhadap Angkatan Darat

a. Angkatan Darat Sebelum Meletusnya G30S/PKI

Dicabutnya legitimasi politik Angkatan Darat pada tanggal 1 Mei 1963 tersebut membuat pimpinan Angkatan Darat harus membuat strategi politik lain. TNI AD terus berusaha dengan gencar menyatakan kepada public bahwa TNI AD akan tetap berpolitik baik dengan maupun tanpa S.O.B. TNI AD juga memasang strategi politik lain yaitu *civic mission*, yang merupakan program TNI AD dalam membantu masyarakat dibidang non-militer. Prajurit TNI disiapkan agar bisa melakukan hal-hal di luar non-militer seperti pembangunan pembuatan jalan, saluran irigasi, pertanian, produksi barang, menyediakan alat transportasi dan lain-lain yang inti pokoknya adalah kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Usaha lain yang dilakukan TNI AD untuk memperkuat posisi politiknya pasca S.O.B dicabut adalah dengan menyatukan berbagai golongan fungsional dibawah payung TNI AD. Gabungan golongan fungsional tersebut kemudian diberi nama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), dan mendirikan Sekretariat Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI) untuk menandingi Sekretariat Bersama Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang didirikan PKI. SOKSI ditujukan untuk menarik anggota SOBSI sehingga dapat melemahkan PKI.

Pada tahun 1963 Indonesia dihadapkan pada masalah luar negeri yaitu konfrontasi dengan Malaysia yang berencana membentuk Federasi Malaysia. PKI yang merasa terancam akan bahaya liberalisme mendukung konfrontasi tersebut dengan menyatakan massa PKI siap dipersenjatai untuk dijadikan Angkatan Kelima.³⁷ TNI AD yang khawatir jika PKI dipersejatai, maka PKI akan dengan mudah menyerang TNI AD. KSAD Ahmad Yani dengan terang-terangan menentangnya. Untuk mencegah rencana PKI tersebut, KSAB A.H. Nasution mengerahkan prajurit TNI untuk konfrontasi dengan membentuk Komando Siaga (Koga).

³⁷ Namun sesungguhnya ancaman ini tidak hanya berlaku bagi komunis. Tindakan PKI yang dengan gencar itu juga mengkhawatirkan Amerika sebagai negara adidaya yang berideologi liberalis. Oleh karena itu mengapa saat sengketa Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda, PBB (AS) mendesak Belanda agar mau menyetujui Perjanjian New York pada tanggal 15 Januari 1962, karena AS khawatir bahwa komunis akan mengambil keuntungan dalam konflik tersebut. Lihat, A. Kardiyat Wiharyanto, *op.cit.*, hlm.102.

Konflik antara TNI AD dengan PKI semakin memanas ketika memasuki tahun 1965. Pertengahan tahun 1965 Waperdam I Dr. Subandrio yang berhaluan kiri (PKI) melaporkan telah ditemukan sebuah dokumen yang bernama dokumen Gilchrist. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa ada sekelompok perwira Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden.³⁸ Puncak perseteruan antar TNI AD dengan PKI adalah peristiwa G30S/PKI dengan diculiknya pimpinan teras TNI AD yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965.

b. Angkatan Darat Pasca G30S/PKI dan Keluarnya Supersemar

Pasca peristiwa G30S/PKI Presiden Sukarno bersikeras akan mempertahankan kekuasaannya dan tetap melindungi PKI. Presiden tetap pada pendiriannya bahwa kekuatan komunis harus tetap hidup di Indonesia sesuai konsepnya dahulu yaitu NASAKOM dan melihat bahwa kejadian dini hari tanggal 30 September 1965 tersebut hanyalah sebuah riak kecil di dalam sebuah lautan revolusi.

Pagi harinya tanggal 1 Oktober 1965 Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayjen. Suharto dari markas besar Kostrad menyatakan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat untuk sementara, setelah mengkontak dan mendapat restu dari panglima Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian. Setelah itu Mayjen. Suharto memerintahkan untuk membersihkan PKI beserta ormas-ormasnya. Pembersihan PKI tersebut dilakukan oleh RPKAD dibawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo.³⁹ Tuntutan pembersihan PKI tersebut juga muncul dari demonstrasi yang dilakukan mahasiswa.

Memasuki tahun 1966 aksi demonstrasi mahasiswa tidak dapat terelakkan lagi. Presiden kemudian mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret yang ditujukan kepada Jenderal Suharto, yang isinya memerintahkan kepada Menpangad Letjen. Suharto atas nama Presiden, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan keselamatan jalannya pemerintahan dan kesatuan RI. Sejak keluarnya Supersemar tersebut TNI AD karir politiknya terus melejit, bulan Maret 1967 Jenderal Suharto diangkat sebagai Pejabat Presiden, dan satu tahun

³⁸ A. Pambudi, *Supersemar Palsu Kesaksian Tiga Jenderal*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), hlm.189.

³⁹ Pasukan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) merupakan pasukan khusus berlevel pasukan Para yang dimiliki Angkatan Darat yang dikemudian hari berubah nama menjadi Kopassus (Komando Pasukan Khusus).

kemudian yaitu pada bulan Maret 1968 Jenderal Suharto resmi diangkat sebagai Presiden RI yang kedua menggantikan Presiden Sukarno.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Angkatan Darat (TNI AD) mempunyai faktor pendorong yang kuat untuk masuk dunia politik. Konflik antara sipil dengan TNI AD menjadi pendorong bagi TNI AD untuk masuk politik, baik karena sikap golongan sipil yang kurang harmonis kepada TNI AD, maupun sikap golongan sipil dalam menghadapi musuh yang mengancam kedaulatan RI dirasa oleh para perwira TNI AD tidak efektif dan merugikan bangsa. Beberapa peristiwa yang muncul seperti Peristiwa 3 Juli 1946, Peristiwa 17 Oktober 1952, Piagam Keutuhan Angkatan Darat, pergolakan daerah luar Jawa merupakan peristiwa yang terjadi akibat konflik antara sipil dengan TNI AD.
2. Selama 6 tahun diberlakukannya S.O.B (Tahun 1957-1963) TNI AD dibawah pimpinan Jenderal A.H. Nasution memanfaatkan kesempatan itu dengan baik sekali. TNI AD membentuk berbagai badan dan strategi untuk memperkuat otoritasnya selama S.O.B diberlakukan. Usaha TNI AD tersebut antara lain membentuk BKSM, peleburan berbagai organisasi veteran ke dalam satu wadah organisasi TNI AD yaitu LVRI, pembentukan Dewan Nasional, pembentukan FNPIB, dan berusaha memberlakukan kembali UUD 1945 sertamenjadikan golongan militer sebagai golongan fungsional yang sah di dalam pemerintahan.
3. Dicaputnya S.O.B tahun 1963 membuat konflik antara TNI AD dengan PKI semakin memanas. Puncak konflik tersebut adalah peristiwa G30S/PKI dengan diculik dan dibunuhnya para pimpinan teras TNI AD. Pasca peristiwa G30S/ PKI tersebut TNI AD dibawah Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Jenderal Suharto berhasil membasmi PKI yang selama ini menjadi musuh utama TNI AD. Dibawah Menpangad Jenderal Suharto TNI AD juga mendapatkan legitimasi yang lebih kuat dari pada S.O.B yaitu Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966. Kedudukan TNI AD semakin kuat ketika tahun 1967 Jenderal Suharto diangkat sebagai Pejabat Presiden dan setahun kemudian yaitu pada tahun 1968 Jenderal Suharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.H. Nasution. (1989). *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 4*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- _____ (1989). *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- _____ (2013). *Peristiwa 17 Oktober 1952 Ketika "Moncong" Meriam Mengarah ke Istana Merdeka*. Yogyakarta: Narasi.
- A. Kardiyat Wiharyanto. (2011). *Sejarah Indonesia Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Aman. (2013). *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan*. Yogyakarta: Pujangga Press.
- A. Pambudi. (2006). *Supersemar Palsu Kesaksian Tiga Jenderal*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Asvi Warman Adam. (2007). *Seabad Kontroversi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Audrey Kahin. (2008). *Dari Pemberintak Ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor.
- M.C. Ricklefs. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Rosihan Anwar. (2007). *Soekarno, Tentara, PKI Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rushdy Hoesein. (2010). *Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati*. Jakarta: Kompas.
- Soebijono, dkk. (1997). *Dwi Fungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sunarso dkk. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan PKN untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Taufik Abdullah, dkk. (2011). *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yahya A.Muhaimin. (2005). *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Yuli Hananto. (2005). *Bermuka Dua Kebijakan Soeharto Terhadap Soekarno Beserta Keluarganya*. Yogyakarta: Ombak.

Zulkarnain. (2012). *Jalan Meneguhkan Negara*. Pujangga Press: Yogyakarta.

Arsip:

Arsip Nasional Republik Indonesia. Keputusan Dewan Perjuangan Tentang Pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/PRRI.

Arsip Nasional Republik Indonesia. No.2344/SU/RDG/52. Tentang perihal Angkatan Darat dalam peristiwa 17 Oktober 1952.

Koran:

Kedaulatan Rakyat, *Suasana Ibukota Kini Sangat "Ernstig"*. Tanggal 17 Oktober 1952.

Kedaulatan Rakyat, *Pemboikotan pelantikan KSAD Kolonel Bambang Utoyo oleh perwira Angkatan Darat*. Tanggal 28 Juni 1955.

Kedaulatan Rakyat, *Kolonel Bambang Sugeng Tolak Jabatan KSAD*. Tanggal 11 Desember 1952.

Kedaulatan Rakyat, *Djanji Para Perwira*. Tanggal 26 Februari 1955.

Yogyakarta, 21 April 2016

Menyetujui

Pembimbing

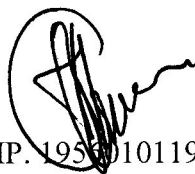
Zulkarnain, M.Pd



NIP. 197408092008121001

Penguji Utama

Drs. Djumarwan



NIP. 195301011985021001